



MAQASHID SYARIAH SEBAGAI PARAMETER KEBERHASILAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Ria Nelta Febriyanti,

Universitas Kader Bangsa

Email : rianelta.febriyanti@gmail.com

Abstract

Corporate Social Responsibility is a company's sensitivity in looking at its surroundings, both society and the environment. The implementation of corporate social responsibility is now increasingly developing. However, unfortunately, this development is not matched by an increase in the welfare of the surrounding community. This is because there are no clear CSR success parameters from the government that must be adopted by companies. In Islamic economics, welfare cannot be measured by just looking at an increase in assets owned. However, the benchmark for prosperity is measured by maintaining five values or what is known as maqashid sharia. Maqashid sharia consists of five maintenance, namely Deen (religion), Nafs (soul), Aql (reason), Nashl (offspring), and Maal (treasure). Maqashid sharia are the five basic goals of a human being to achieve falah (prosperity). As the government's effort to achieve the 2015 MDGs program, maqashid sharia is expected to become an indicator for companies in measuring the success of their CSR. With the existence of maqashid sharia as a parameter for the success of corporate social responsibility, it is hoped that it will be able to accelerate the achievement of the goals of ongoing government programs.

Key words: *Corporate Social Responsibility, Maqashid Syariah, Parameters, Welfare.*

Abstrak

Corporate Social Responsibility merupakan kepekaan suatu perusahaan dalam melihat keadaan sekelilingnya, baik masyarakat ataupun lingkungannya. Pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan itu kini makin berkembang. Namun sayang, perkembangan tersebut tidak diimbangi dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan tidak adanya parameter keberhasilan CSR yang jelas dari pemerintah yang harus ditempuh oleh perusahaan. Di dalam ekonomi Islam, kesejahteraan tidak bisa diukur dengan hanya melihat suatu peningkatan harta yang dimiliki. Namun, yang menjadi tolok ukur suatu kesejahteraan diukur dengan pemeliharaan lima nilai atau yang dikenal dengan maqashid syariah. Maqashid syariah yang terdiri dari lima pemeliharaan, yakni Dien (agama), Nafs (jiwa), Aql (akal), Nashl (keturunan), dan Maal (harta). Maqashid syariah ini merupakan lima tujuan dasar seorang manusia untuk mencapai falah (kesejahteraan). Sebagai upaya pemerintah dalam mencapai program MDGs 2015, maqashid syariah ini diharapkan menjadi suatu indikator perusahaan dalam mengukur keberhasilan CSR nya. Dengan adanya maqashid syariah ini sebagai parameter keberhasilan corporate social responsibility diharapkan mampu memberikan percepatan terhadap pencapaian tujuan dari program-program pemerintah yang berjalan.

Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Maqashid Syariah, Parameter, Kesejahteraan.

A. PENDAHULUAN

Definisi CSR menurut Elkington (1997) menyatakan bahwa CSR merupakan aktivitas yang mengoptimalkan *triple bottom line* atau 3P, yakni mengejar keuntungan (*profit*) untuk kepentingan *shareholders*, memperhatikan kepentingan *stakeholders* dan memenuhi kesejahteraan masyarakat (*people*), serta berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Namun nampaknya sampai saat ini, aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan lebih kepada mengejar keuntungan (*profit*) daripada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan dalih bahwa bukan menjadi tanggungjawab perusahaan dalam mensejahterakan masyarakat dan juga melestarikan lingkungan yang merupakan lingkup peran pemerintah sebagai aparatur negara. Perusahaan hanya menganggap CSR merupakan biaya tambahan yang harus dikeluarkan lagi oleh perusahaan selain pajak yang harus disetorkan kepada pemerintah. Ditengah negara yang masih banyak terjadi tindak korupsi, CSR hanya akan lebih menggelembungkan beban biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Namun sejak dikeluarkannya UU PT N0. 40 Tahun 2007 Pasal 74 mengenai tanggungjawab sosial perusahaan, sudah menjadi kewajiban dari setiap perusahaan baik itu perusahaan ekstraktif atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan lainnya untuk menjalankan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Setelah dikeluarkannya peraturan tersebut, banyak perusahaan yang telah menjalankan CSR sesuai dengan proporsi masing-masing perusahaan yang menurut perusahaan layak dan sesuai dengan visi dan misi masing-masing perusahaan. Tidak adanya standar prosedur mengenai tata cara kelola CSR yang hanya menjalankan sesuai dengan proporsi perusahaan masing-masing ditambah belum adanya prosedur terperinci yang dituangkan dalam peraturan pemerintah mengenai bagaimana cara menerapkan CSR, semakin menambah tidak ada pengaruhnya CSR tersebut baik terhadap masyarakat maupun lingkungan.

Motivasi yang di latarbelakangi sekedar basa-basi dan keterpaksaan yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan CSR juga membuat CSR tersebut tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. CSR yang dijalankan dengan motivasi karitatif dan kemanusiaan yang hanya sekedar "*do good and to look good*", berbuat baik agar terlihat baik juga CSR dijalankan karena adanya faktor eksternal yakni karena mengendalikan aspek sosial (*social*

driven) maupun mengendalikan aspek lingkungan (*enviromental driven*) yang artinya pemenuhan tanggungjawab dilakukan lebih karena keterpaksaan akibat tuntutan daripada kesukarelaan. Banyak perusahaan yang sengaja mendongkrak citranya dengan memberikan bantuan ketika bencana alam terjadi dan kemudian menginformasikannya melalui berbagai media yang tujuannya untuk mengendalikan reputasi perusahaan (*reputation driven*). CSR yang hanya dijalankan *accidentally* dan tidak berkelanjutan (*unsustainability*) tidak akan memberi manfaat sama sekali baik terhadap masyarakat maupun lingkungan.

Perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dan perusahaan beroperasi di dalam suatu tatanan lingkungan masyarakat, oleh karenanya sudah seharusnya perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar perusahaan. Perlu adanya hubungan symbiosis mutualisme antara perusahaan dan lingkungan sekitar. Ketika perusahaan baru memulai kegiatan operasinya pada suatu wilayah, maka hal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi dampak-dampak yang akan terjadi ketika perusahaan telah melakukan operasi pada suatu tatanan lingkungan masyarakat juga ketika perusahaan sudah tidak melakukan kegiatan operasinya lagi. Sudah seharusnya, perusahaan telah memperhitungkan dampak-dampak apa saja yang dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan sekitar ketika perusahaan tidak lagi beroperasi. Maka hal yang juga dilakukan oleh perusahaan selain melakukan aktivitas perusahaan yang mengejar *profit* juga memberdayakan masyarakat sekitar agar masyarakat bisa mandiri ketika perusahaan tidak lagi melakukan kegiatan operasinya.

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) yang dilakukan perusahaan adalah suatu usaha untuk mewujudkan *community development* dalam usaha perusahaan untuk mencapai *good corporate governance*. Salah satu tujuan CSR yang dijalankan oleh perusahaan adalah untuk mensejahterakan masyarakat (*people*). Namun sampai saat ini, banyak perusahaan yang tidak tepat sasaran dalam menjalani program CSR yang mereka jalankan. Program-program tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan Masyarakat. Program-program yang diberikan seharusnya program yang produktif bagi masyarakat, bukan program yang sifatnya konsumtif dan tidak memiliki manfaat jangka panjang.

Pemberian bantuan modal kerja salah satunya bisa menjadi program CSR yang mampu membuat masyarakat sekitarnya mandiri dan memiliki kualitas hidup yang lebih

baik. Model CSR yang dilakukan perusahaan kebanyakan yakni model langsung, Dimana perusahaan memberikan langsung program CSR perusahaan mereka kepada masyarakat dalam kegiatan sosial berupa bantuan-bantuan bahan makanan, Pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Dalam hal ini, program CSR yang dijalankan perusahaan bersifat konsumtif, tidak memberikan manfaat kesejahteraan jangka panjang terhadap masyarakat sekitar.

Kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan agar mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat (*people*) dapat berupa pemberian bantuan modal kerja atau lainnya yang membuat masyarakat lebih mandiri dalam hal ekonomi serta mampu memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan keluar dalam jerat kemiskinan. Namun yang terjadi saat ini yakni perusahaan belum bisa membantu pemerintah dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan yang tidak mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahunnya membuktikan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 sebesar 9,57% meningkat 0,03% poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14% terhadap September 2021. Tingkat pertumbuhan GDP yang menjadi standar ukur kesejahteraan masyarakat di Indonesia sebenarnya tidak sepenuhnya bisa menjadi parameter kesejahteraan. Di dalam ekonomi Islam, kesejahteraan tidak bisa diukur hanya dengan melihat suatu peningkatan harta yang dimiliki. Namun, di dalam ekonomi Islam yang menjadi parameter suatu kesejahteraan diukur dengan pemeliharaan 5 nilai atau yang dikenal dengan *Maqashid Syariah*. *Maqashid Syariah* yang terdiri dari lima pemeliharaan, yakni *Dien* (agama), *Nafs* (jiwa), *Aql* (akal), *Nasl* (keturunan), dan *Maal* (harta). Di dalam ekonomi Islam, kesejahteraan hanya bisa diukur dari 5 pemeliharaan nilai tersebut.

Menurut Ike Janita dalam bukunya *Creating and Sustaining Brand Equity* mengutip (Bron dan Vrioni, 2001; Kotler dan Lee, 2005; Varadajan dan Menon, 1998) bahwa kegiatan CSR memang memberikan banyak dampak positif pada kinerja perusahaan, terutama pada *outcome* yang berkaitan dengan pemasaran dan pembangunan brand.

Ada berbagai pendapat mengenai aktivitas-aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas sosial yang menunjukkan bentuk keterlibatan sosial perusahaan terhadap masyarakat. Kotler dan Lee (2005: 23) dalam Masnila (web:2010) merumuskan aktivitas

Ria Nelta Febriyanti: Maqashid Syariah Sebagai Parameter Keberhasilan Program Corporate Social Responsibility

yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dalam 6 kelompok kegiatan : *promotion, marketing, corporate social marketing, corporate philanthropy, community volunteering, dan social responsibility business practices.*

Dalam perspektif Islam Corporate Social Responsibility adalah praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara islami. Perusahaan memasukan norma-norma agama islam yang ditandai dengan adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial di dalam operasinya. Dengan demikian, praktik bisnis dalam kerangka CSR Islami mencakup serangkaian kegiatan bisnis dalam bentuknya. Meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa serta profitnya, namun cara-cara untuk memperoleh dan pendayagunaannya dibatasi oleh aturan halal dan haram oleh syariah (Suharto,2010).

Menurut AAOIFI yaitu segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial Islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika, dan discretionary responsibilities sebagai lembaga finansial intermediasi baik bagi individu maupun institusi.

Menurut Islam, tanggung jawab sosial yang dilakukan harus bertujuan untuk menciptakan kebajikan yang dilakukan bukan melalui aktivitas-aktivitas yang mengandung unsur riba, melainkan dengan praktik yang diperintahkan Allah berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Corporate Social Responsibility juga harus mengedepankan nilai kedermawanan dan ketulusan hati (Suharto,2010). Perbuatan ini lebih Allah cintai dari ibadah-ibadah mahdhah. Rasulullah SAW bersabda, *“Memenuhi keperluan seorang mukmin lebih Allah cintai dari pada melakukan dua puluh kali haji dan pada setiap hajinya menginfakan ratusan ribu dirham dan dinar”*. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, *“Jika seorang muslim berjalan memenuhi keperluan sesama muslim, itu lebih baik baginya daripada melakukan tujuh puluh kali thawaf di Baitullah.”*

Selain itu, pelaksanaan CSR dalam Islam juga merupakan salah satu upaya mereduksi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan di masyarakat. Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang (Yusanto dan Yunus, 2009:165-169). Allah Berfirman : *“...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu...”* (QS. Al hasyr: 7).



Selain menekankan pada aktivitas sosial di masyarakat, Islam juga memerintahkan praktik CSR pada lingkungan. Lingkungan dan pelestariannya merupakan salah satu inti ajaran Islam. Prinsip-prinsip mendasar yang membentuk filosofi kebijakan lingkungan yang dilakukan secara holistik oleh Nabi Muhamad SAW adalah keyakinan akan adanya saling ketergantungan di antara makhluk ciptaan Allah. Karena Allah SWT menciptakan alam semesta ini secara terukur, baik kuantitatif maupun kualitatif (*lihat QS. Al Qamar: 49*) dan dalam kondisi yang seimbang (*QS. Al hadid:7*). Sifat saling ketergantungan antara makhluk hidup adalah sebuah fitrah dari Allah SWT. Dari prinsip ini maka konsekuensinya adalah jika manusia merusak atau mengabaikan salah satu bagian dari ciptaan Allah SWT, maka alam secara keseluruhan akan mengalami penderitaan yang pada akhirnya juga akan merugikan manusia (Sharing,2010). Allah SWT berfirman: “*telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar.*” (QS. Ar Rum:41).

Dari latar belakang tersebut, maka penulis mencoba mengkaji dengan jurnal ini dengan judul “***Maqashid Syariah sebagai Parameter Keberhasilan Program Corporate Social Responsibility***”

Adapun tujuan penelitian ini untuk memberikan solusi aplikatif terhadap pengukur atau parameter dalam mengukur keberhasilan *corporate social responsibility* dalam mensejahterakan masyarakat. Penelitian memberikan kontribusi juga untuk masyarakat dengan memberikan kesadaran bahwa sebagaimana seorang warga negara, masyarakat sebaiknya mampu untuk ikut bersinergi bersama pemerintah dan perusahaan untuk menyongsong bangsa ini menjadi lebih baik dengan pencapaian tingkat kesejahteraan.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan ini merupakan penulisan kualitatif, yaitu prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati, didukung dengan studi literatur atau studi kepustakaan berdasarkan pendalaman kajian pustaka berupa data, sehingga realitas dapat dipahami dengan baik. Penulisan kualitatif juga menggunakan data yang dinyatakan secara verbal dan kualifikasinya bersifat teoritis.

Data dalam penulisan ini merupakan jenis data sekunder. Menurut Moleong (2000), data sekunder merupakan data yang berasal dari selain obyek yang diteliti. Data sekunder ini didapatkan dari artikel, literatur kepustakaan, media massa, arsip-arsip tentang data pengangguran terbuka, data tingkat kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.

Untuk memperoleh data yang diperlukan pada penulisan ini, penulis menggunakan metode Studi Pustaka. Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Beberapa literatur ini dapat berupa pustaka cetak maupun elektronik, seperti data-data dari buku literatur, majalah, buletin, tabloid koran dan lain-lain. Penulis lebih banyak mencari data yang berkaitan dengan instansi /obyek penulisan.

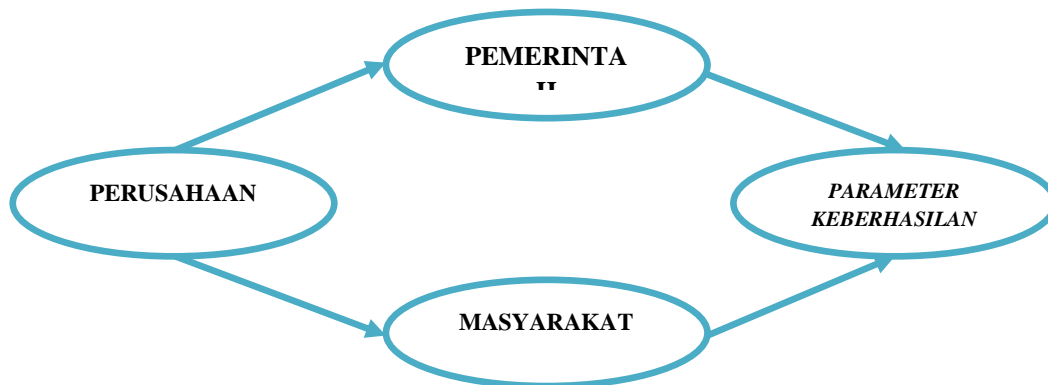
Penulisan jurnal ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dari data-data yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan aturan dan analisis sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada. Dengan metode ini, penulis ingin secara jelas mendeskripsikan tentang parameter keberhasilan yang direkonstruksikan dalam sebuah model yang diberi nama *Maqashid Syariah*.

C. HASIL DAN ANALISIS

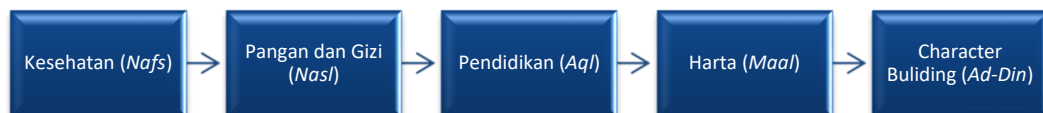
Berdasarkan data dan fakta yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya menyatakan ketidakjelasan standar parameter keberhasilan program *corporate social responsibility*. Selain itu, kendala-kendala dalam pengalokasian dana *corporate social responsibility* atau yang biasanya disingkat menjadi dana CSR yang dirasa belum menemukan titik terang dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah parameter yang jelas dalam menyelesaikan kendala tersebut. Parameter ini berawal dari koordinasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sebagaimana terkait fungsi masing-masing pihak tersebut sehingga terbitlah kesepakatan bersama mengenai apa yang harus dicapai dalam penyelenggaraan program CSR.

Dengan adanya kesepakatan bersama tersebut diharapkan pada pihak pemerintah dan perusahaan tidak ada tumpang tindih terhadap program pengembangan sehingga tidak adanya pemborosan anggaran akibat buruknya koordinasi lintas sektoral. Pihak perusahaan yang menyelenggarakan program CSR pun dapat memperkuat *brand positioning* di kalangan masyarakat. Kesepakatan seperti inilah yang kemudian diimplementasikan dalam

parameter keberhasilan. Hal ini dapat dilihat sebagaimana yang tergambar dalam sebuah model sebagai berikut :



Model tersebut merupakan gambaran awal pembentukan parameter keberhasilan yang harus dicapai dalam pengalokasian dana *corporate social responsibility* guna mencapai target percepatan *millennium development goals*. Kemudian model tersebut dapat dikembangkan menjadi beberapa langkah berikut ini :



Maqashid syariah merupakan tujuan dasar bagi pemenuhan kebutuhan manusia untuk mencapai kemaslahatan. Dengan adanya *maqashid syariah* sebagai parameter keberhasilan *corporate social responsibility* diharapkan mampu memberikan percepatan terhadap pencapaian tujuan dari program-program pemerintah yang berjalan.

Dalam konteks ini, kualitas sumber daya manusia merupakan suatu kebutuhan yang harus segera ditangani agar bisa mendorong tujuan-tujuan yang telah ditentukan pemerintah pada semua skala baik besar, menengah maupun kecil tidak bisa lepas dari daya dukung SDM yang berkualitas.

a. Kebutuhan Kesehatan (Nafs)

Kesehatan merupakan kebutuhan asasi yang harus diperoleh manusia dalam hidupnya.

Hal ini berarti kesehatan mempunyai makna penting sebagai salah satu hak dasar manusia.

Tanpa kesehatan yang prima seseorang akan kesulitan untuk mencapai kualitas hidup yang dicita-citakan. Sebaliknya, dengan adanya jaminan hak atas kesehatan, seseorang dapat memilih dan menentukan sendiri kualitas hidup yang dicita-citakan. Dalam pandangan ini, kesehatan mempunyai makna dan nilai ekonomis. Artinya, apabila seseorang dalam kondisi sakit, kesempatan untuk melakukan aktivitas produktif menjadi terhambat, yang pada gilirannya kesempatan meningkatkan kesejahteraan juga menjadi terganggu.

Dalam hubungan ini, komitmen perusahaan dan pemerintah pada sektor masyarakat adalah untuk membangun tingkat kehidupan yang lebih baik sehingga angka kematian serta orang sakit dapat diturunkan secara gradual.

b. Kebutuhan Pangan dan Gizi (*Nasl*)

Kehidupan manusia tidak terlepas dari ketersediaan pangan yang baik. Untuk mempertahankan eksistensinya, kebutuhan pangan dan gizi harus terpenuhi. Begitu pentingnya ketersediaan pangan dalam kehidupan, untuk itu Al-Quran memberikan petunjuk yang sangat jelas kepada manusia tentang apa saja yang harus dikonsumsi, diantaranya barang itu boleh dimakan (*halal*) dan baik (*thayyib*), tidak boleh ada pemborosan dan berlebih-lebihan.

Tercapainya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang baik mampu memberikan dampak baik bagi kelangsungan hidup manusia. Mulai dari penurunan angka gizi buruk hingga kematian bayi dan ibu.

c. Kebutuhan Pendidikan (*Aql*)

Peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan akan mempertinggi produktivitas di masa depan dan harus dinilai sebagai suatu investasi sumber daya manusia. Secara fundamental, masyarakat yang sehat dan punya keahlian akan lebih tinggi tingkat produktivitasnya. Pendidikan menjadi proses penting dalam meregenerasi kehidupan bangsa dan negara sehingga menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tongkat estafet kepemimpinan bangsa di masa akan datang.

Salah satu hal yang terpenting yang menjadi tujuan penyelenggaraan program CSR adalah menyelenggarakan pendidikan yang efisien yang disesuaikan dengan kebutuhan bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Dengan keberhasilan pendidikan, diharapkan

Ria Nelta Febriyanti: Maqashid Syariah Sebagai Parameter Keberhasilan Program Corporate Social Responsibility

menjadi salah satu upaya pengentasan kemiskinan dan terwujudnya pemerataan pendapatan.

d. Pengentasan Kemiskinan atau Harta (*Maal*)

Adanya keharusan setiap individu untuk bermanfaat bagi dirinya dan orang di sekelilingnya dimanifestasikan dalam anjuran atau perintah bekerja dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Salah satu pepatah kata mengatakan tangan yang berada di atas itu lebih baik daripada tangan yang berada di bawah. Hal ini menganjurkan untuk berusaha dan memberi bantuan kepada sesama baik dalam pemberian yang berupa materiil maupun moriil.

Pemberian yang berupa materiil dalam bentuk modal kerja mampu menciptakan lapangan kerja baru sehingga terbentuknya alur perluasan lapangan kerja yang berkelanjutan sehingga akan adanya upaya pengentasan kemiskinan. Terlihat dari peningkatan pendapatan riil yang menyebabkan adanya daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Artinya, pengentasan kemiskinan adalah dengan memproduktifkan orang-orang kurang mampu dengan memberikan bantuan. Dengan membantu mereka menjadi produktif, maka semua orang dapat ikut berpartisipasi di bidang ekonomi menurut kemampuan yang dimiliki. Dengan cara ini pertumbuhan ekonomi akan dapat dibangkitkan dari keterpurukan sedikit demi sedikit.

e. Character Building (*Ad-Din*)

Melihat kasus degradasi moral yang sedang melanda beberapa negara berkembang termasuk Indonesia. Terlihat miris melihat angka perkembangan penyimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat mulai dari lapisan terbawah hingga teratas. Untuk memahami fenomena tersebut dengan lebih baik adalah perlu menambahkan perspektif baru yang berfokus pada *sharia values* dengan berlandaskan kepada nilai-nilai syariah yang lebih bersifat dinamis dan komprehensif. Adapun nilai-nilai syariah yang harus dimiliki dan tertanam dalam setiap individu adalah sebagai berikut :

1. *Shiddiq*, moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dalam mencapai tujuan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (*halal*) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*syubhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (*haram*).



2. *Tabligh*, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi terhadap lingkungan. Dalam melakukan sosialisasi, tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata melainkan juga harus saling mampu mengedukasi sesama masyarakat.
3. *Amanah*, menjaga dengan ketat prinsip kejujuran dalam bersikap sehingga akan timbul rasa saling percaya antar sesama masyarakat dan lingkungan sekitar.
4. *Fathanah*, kecermatan dan kesantunan serta penuh tanggung jawab dalam melakukan aktivitas sehari-hari sehingga mampu meminimalisir risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Akhlak yang baik diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan apalagi dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, diperlukan arahan agar manusia mengetahui apa akhlak yang baik itu sehingga kecurangan dapat dicegah. Di dalam menjalankan aktivitas harus didasarkan iman, etika, dan akhlak.

Sebelum menganalisa tentang hasil pencapaian target dari program *corporate social responsibility* yang nantinya mengakselerasi pencapaian tujuan Pembangunan Indonesia. Perlu dipahami bahwa sesungguhnya target yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang apabila diberdayakan dengan baik akan memberikan hasil yang baik pula. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan adanya *maqashid syariah* sebagai parameter keberhasilan *corporate social responsibility* maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang berpotensi bagi pengembangan Indonesia di masa yang akan datang.

Dengan adanya parameter yang jelas inilah diharapkan juga mampu membantu program berjalan pemerintah saat ini. Agar program itu menjadi tak sia-sia sehingga adanya program pemberdayaan yang efektif dan efisien.

Indikator suatu pertumbuhan yang baik pun dikatakan berhasil bila *multiplier effect* mengalir hingga lapisan terbawah. Di tengah masyarakat pun akan terlihat dampak signifikan yaitu akan adanya perubahan baik dari fisik maupun psikis mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga akhlak masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dampak terhadap pertumbuhan kehidupan yang lebih baik akan terakselerasi dengan sendirinya melalui salah satu program yaitu *corporate social responsibility*.

D. KESIMPULAN

Ketidaktejelasan standar parameter keberhasilan penyelenggaraan program corporate social responsibility menjadi salah satu penghambat. Padahal, berbagai program yang diadakan baik pemerintah maupun perusahaan dalam pengembangannya telah dilakukan. Namun sayangnya tak seperti yang diharapkan. Adanya keseriusan dari kedua pihak tersebut dalam mempercepat pencapaian Pembangunan Indonesia melalui parameter keberhasilan yang jelas sehingga terwujudnya multiplier effect yang diharapkan selama ini.

Parameter tersebut tertuang dalam design model *Maqashid Syariah*. Sebuah parameter keberhasilan program *Corporate Social Responsibility* sehingga dalam penyelenggaraan program *Corporate Social Responsibility* menjadi lebih efektif dan efisien.

Pemerintah dan perusahaan dapat mempertimbangkan design model *Maqashid Syariah* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia. Penerapan design model parameter *Maqashid Syariah* harus dilaksanakan sesegera mungkin, mengingat permasalahan Indonesia yang semakin kompleks. Design model *Maqashid Syariah* ini belum lagi sempurna. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut terutama mengenai implementasi program.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-qur'an nulkarim &.Terjemah. (2005) Bandung: PT. Syaamil Cipta Media.
- Dewi, I J. (2009). *Creating and Sustaining Brand Equity*. Yogyakarta: Amarama Books
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks the triple bottom line of 21st century bussiness*. Capston:Oxford
- Masnila, N. (2010). *Corporate Social Responsibility : Sebuah Pandangan dari Sudut Akuntansi (Corporate Social Responsibility : An Overview from Accounting Perspective)*. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
- Suharto, E. (2010). *Corporate Social Responsibility: What is and Benefits for Corporate*. (Available at : www.google.com)